

Muhammad Rizaldi, S.H., LL.M

Email: mrizaldi@ijrs.or.id

LinkedIn: [Muhammad Rizaldi](#)



Profil Singkat

Muhammad Rizaldi merupakan lulusan program sarjana Hukum, Universitas Indonesia. Ia kemudian menempuh program master di the University of Melbourne dengan fokus studi yang sama melalui jalur beasiswa 'Australia Awards Scholarship 2018'. Keterlibatannya pada Reformasi Hukum dan Peradilan sudah dimulai sejak 2011 sebagai volunteer di Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. Setelah lulus dari FHUI pada tahun 2013, Rizaldi bergabung menjadi peneliti di MaPPI FHUI, hingga dipercaya menjadi Ketua lembaga tersebut pada tahun 2019. Di IJRS, Rizaldi mengawali karir sebagai peneliti adjunct dan kemudian dipercaya untuk menjabat sebagai Plt. Direktur Eksekutif pada tahun 2025.

Dengan pengalaman lebih dari 13 tahun bekerja sebagai peneliti, Rizaldi telah terlibat dalam program-program yang terkait dengan berbagai macam isu, antara lain: isu perlindungan kelompok rentan, akses terhadap keadilan, reformasi peradilan, anti-korupsi, filantropi, dan hak asasi manusia. Terbaru, ia aktif sebagai Tenaga Ahli pada Kementerian HAM RI untuk penyusunan RPerpres Pengarusutamaan HAM dalam Pembentukan PUU dan anggota tim penghubung MA - KY, dan anggota tim pengarah Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia (Open Government Indonesia).

Jabatan Saat Ini

Plt. Direktur Eksekutif - Peneliti IJRS

Pendidikan

1. S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (lulus 2013)
2. S2 Master of Law di the University of Melbourne (lulus 2019)

Pengalaman Kerja

1. Paralegal di LBH Masyarakat (2011)
2. MaPPI FHUI (2013 - 2024)
3. IJRS (2019 - sekarang)

Program IJRS yang Pernah Dijalankan

1. Penyusunan Juklak-Juknis Pengarusutamaan HAM dalam Pembentukan PUU - Kementerian HAM RI 2026
2. Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum 2024 - BPHN 2025
3. Penguatan Manajemen SDM Jaksa - Kejaksaan 2025
4. Drafter - Naskah Urgensi dan RPP Penyelenggaraan Sumbangan - Penabulu 2024
5. Lead - Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum 2020 - 2023 - Kementerian PPN/Bappenas 2021 - 2024
6. Kajian Mekanisme Penegakan Hukum dalam RUU Penghapusan Diskriminasi - CRM 2024
7. Program Officer - Riset Anggaran Bantuan Hukum - NCHR 2023
8. Program Manager - Penyusunan draft Pedoman Kejaksaan tentang Akomodasi Yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan - AIPJ2 2023
9. Program Officer - Riset Reformasi Hukum Acara Pidana yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas - AIPJ 2023

Program IJRS yang Sedang Dijalankan

1. Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum 2025 - BPHN 2026
2. Penyusunan RPerpres Pengarusutamaan HAM dalam Pembentukan PUU - Kemenham 2026
3. Penelitian peluang pembentukan dan penerapan *trust fund* oleh masyarakat sipil - Penabulu 2026

Hasil Publikasi

Buku

1. Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia (2020 - 2023) Jakarta: Kementerian PPN Bappenas RI
2. Rekomendasi Kebijakan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Bidang Hukum dalam RPJMN 2025 – 2029 (2024) Jakarta: Kementerian PPN Bappenas RI
3. Tinjauan Hukum Implementasi UU PTPPO Di Indonesia (2023) Jakarta: IJRS
4. Modul Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2023) Jakarta: Badiklat Kejaksaan
5. Pembaharuan Hukum Acara Pidana untuk Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum (2022) Jakarta: IJRS
6. Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia (2021) Jakarta: Kementerian PPN Bappenas RI

Artikel Jurnal

1. Menakar Partisipasi Publik dalam Mengawasi Kinerja Aparat Penegak Hukum Pada Persidangan Pidana (2017). Jurnal Teropong Vol. 6 (Juli-Des), Jakarta: MaPPI FHUI

Opini

1. Why legal aid is not working in Indonesia (2019) Indonesia at melbourne, <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/why-legal-aid-is-not-working-in-indonesia/>

Tulisan di Media

1. Kebebasan berpendapat di internet dan hukum pidana. (2019) detik.com. <https://news.detik.com/kolom/d-4647796/kebebasan-berpendapat-di-internet-dan-hukum-pidana>
2. Seleksi Pimpinan KPK: Memilih Pemain Bintang atau Pemberantasan Korupsi. (2019) detik.com. <https://news.detik.com/kolom/d-4616635/seleksi-pimpinan-kpk-pemain-bintang-atau-pemberantasan-korupsi>

Pencapaian

1. Penerima Beasiswa Australia Awards, 2018.